

Penghentian EODB dan Kelanjutan Kemudahan Berusaha di Indonesia

2 November 2021

1 | **Koordinasi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia**

2 | **Penghentian Laporan Doing Business (Kemudahan Berusaha) oleh Bank Dunia**

3 | **Pertimbangan Indeks yang dapat menggantikan EODB**

4 | **Reformasi Regulasi Kemudahan Berusaha di Indonesia**

1 | Koordinasi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia

Instruksi Presiden kepada Kepala BKPM melalui
Inpres No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha

DIKTUM PERTAMA

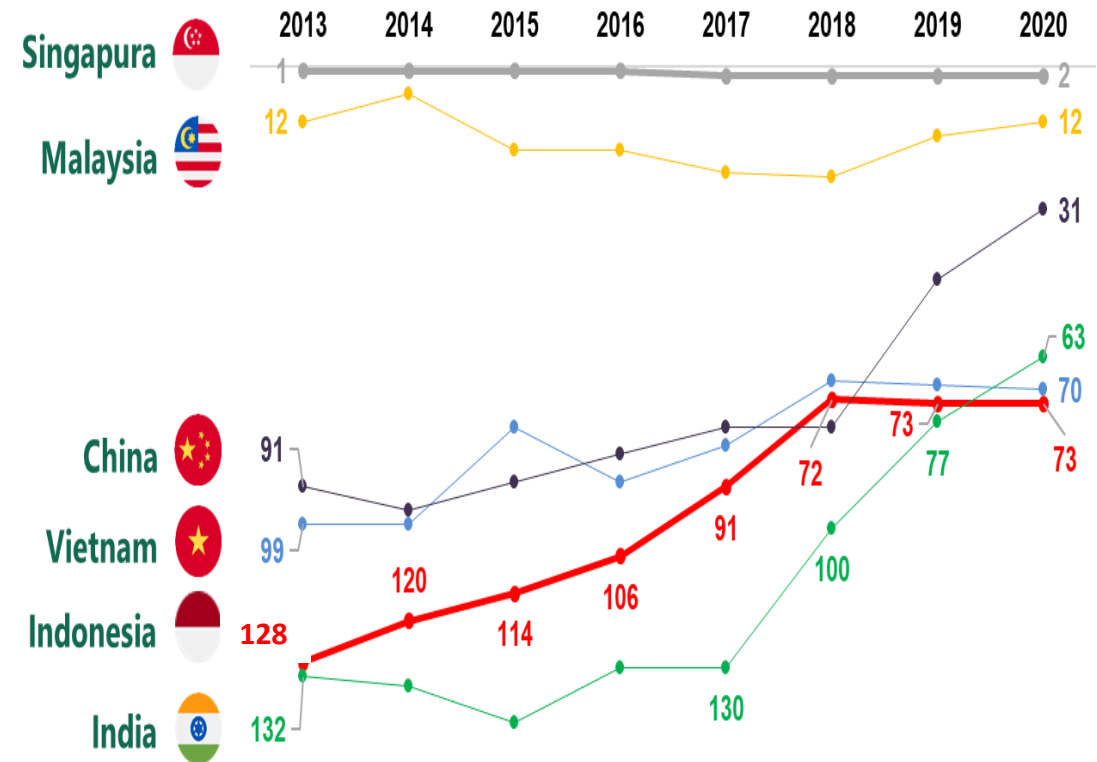
1 Mengoordinasikan langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat *Ease of Doing Business*.

2 Melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh K/L.

3 Menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha dan fasilitas investasi kepada K/L.

4 Memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi.

Peringkat EODB



Pemerintah Indonesia memiliki aspirasi untuk mencapai peringkat 40 besar dalam kemudahan berusaha, sebagaimana dilaporkan dalam laporan *Ease of Doing Business (EODB)*, melalui berbagai reformasi ...



*... posisi kita, kemudahan berusaha, ranking kita di angka 73, atau di ASEAN kita posisi enam ... **Saya minta (peringkat) di bawah 40***

- President Joko Widodo, 2020 -



*Jadi tidak ada alasan lagi ke adik-adik kita yang memulai usaha mengatakan izin itu butuh biaya lagi. Gak perlu ketemu menteri, gak perlu ketemu kepala daerah, **cukup lewat OSS, dia akan dapatkan (izin usaha)** karena itu masuk skala rendah*

- Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, 2021 -



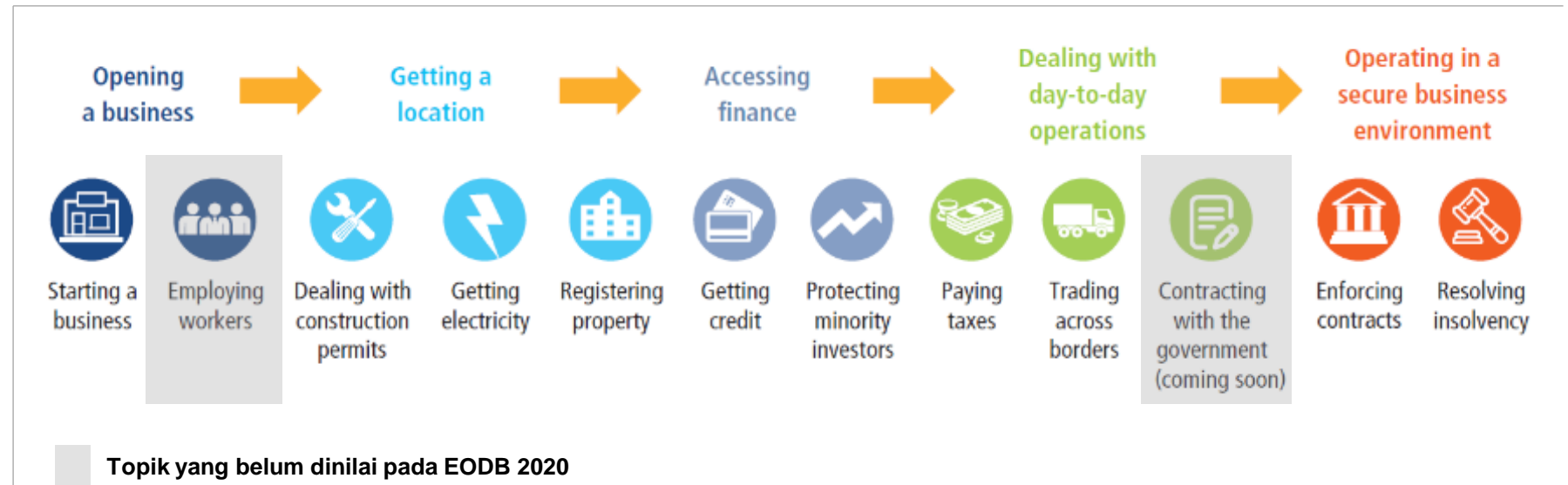
EODB memberikan penilaian objektif terhadap kemudahan berusaha melalui 10+2 topik yang diukur di 190 negara

10+2 topik yang dinilai oleh *Ease of Doing Business*



Tujuan penilaian EODB

Tujuannya adalah untuk mendorong **regulasi yang efisien, transparan, dan mudah diterapkan** sehingga usaha (UMKM) **dapat berkembang.**



- Penilaian EODB dilakukan di kota bisnis terbesar pada 190 negara
- Di 11 negara, termasuk Indonesia, kota bisnis terbesar kedua termasuk kedalam penilaian.

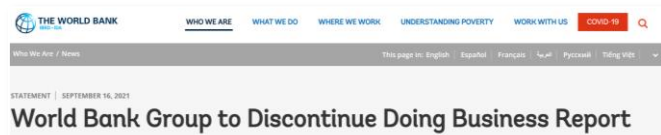
Indonesia berada pada peringkat ke-73 EODB pada tahun 2020 dengan peringkat yang bervariasi untuk masing-masing indikator

List indikator topik EODB

No	Topik	Indikator yang diukur	Ranking IDN 2020
1	Starting a Business	Prosedur, waktu, biaya, dan modal minimum disetor untuk memulai perusahaan terbatas untuk pria dan wanita	140
2	Dealing with Construction Permits	Prosedur, waktu, dan biaya untuk menyelesaikan semua formalitas dalam membangun warehouse dan quality control serta mekanisme keselamatan dalam sistem perizinan konstruksi	110
3	Getting Electricity	Prosedur, waktu, dan biaya untuk terhubung ke jaringan listrik; keandalan pasokan listrik; dan transparansi tarif	33
4	Registering Property	Prosedur, waktu, dan biaya untuk mentransfer properti dan kualitas sistem administrasi pertanahan untuk pria dan wanita	106
5	Getting Credit	Hukum jaminan benda bergerak dan sistem informasi kredit	48
6	Protecting Minority Investors	Hak pemegang saham minoritas dalam transaksi pihak terkait dan dalam tata kelola perusahaan	37
7	Paying Taxes	Pembayaran, waktu, dan total tarif pajak serta kontribusi bagi perusahaan untuk mematuhi semua peraturan pajak serta proses <i>postfiling</i>	81
8	Trading Across Borders	Waktu dan biaya untuk mengekspor produk dari <i>comparative advantage</i> dan untuk mengimpor <i>auto parts</i>	116
9	Enforcing Contracts	Waktu dan biaya untuk menyelesaikan sengketa komersial dan kualitas proses peradilan untuk pria dan wanita	139
10	Resolving Insolvency	Waktu, biaya, hasil, dan tingkat pemulihan untuk kepailitan komersial dan kekuatan kerangka hukum untuk kepailitan	38
11	Contracting with the Government	Prosedur dan waktu untuk berpartisipasi dalam memenangkan kontrak kerja melalui pengadaan publik dan kerangka peraturan pengadaan publik	-
12	Employing Workers	Fleksibilitas dalam regulasi ketenagakerjaan	-

2

Penghentian EODB yang diumumkan oleh World Bank pada 16 September 2021 menciptakan kekosongan dalam acuan kemudahan berusaha ...



WASHINGTON
the followin
"Trust in the
Group prese
informed de
social impro
tool for the p
broodening

REVIEW OF DATA IRREGULARITIES IN DOING BUSINESS

Prepared by Management of the Development Economics (DEC) Vice-Presidency,
the World Bank Group

December 16, 2020

Executive Summary: This document reports the findings of a review of data for Bank-wide review... and 2020 repor... data for four cou...

- **Azerbaijan:** the Getting I... 76.7 with a g... 2020 score is 7... global ranking w... Doing Business 2...
- **Saudi Arabia:** In affecting the Getting... 62. After correctin... given the published da... 63, and it would not ha... these data irregularities n...



Penyimpangan di laporan *Doing Business* 2018 dan 2020 yang melibatkan Tiongkok dan Saudi Arabia berujung pada **penghentian Laporan EODB pada 16 September 2021**

Kronologi Pemberhentian Laporan EODB

27 Agustus 2020

- Ditemukan **penyimpangan dalam perubahan data (data correction)** pada **laporan EODB 2018 dan EODB 2020**
- Dilakukan audit proses pengumpulan data untuk menjaga integritas data oleh pihak ketiga

16 Desember 2020

- Bank Dunia menyampaikan bahwa audit laporan EODB 5 tahun terakhir menunjukkan **penyimpangan yang mempengaruhi peringkat 4 negara**, yaitu Azerbaijan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok
- Laporan EODB 2021 **ditunda penerbitannya**

16 September 2021

- Bank Dunia memutuskan untuk **memberhentikan penerbitan laporan EODB**
- Bank Dunia menyatakan akan menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha

... di mana beberapa negara telah memberikan pernyataan terkait penghentian Laporan EODB serta Langkah selanjutnya

NIGERIA | #131 (EODB 2020)



- Nigeria menyatakan akan **tetap berkomitmen melakukan reformasi** meskipun laporan EODB dihentikan, meskipun belum memutuskan langkah berikutnya terkait acuan perbaikan
- “... Kami akan tetap **berkomitmen pada agenda kami untuk meningkatkan iklim bisnis Nigeria dengan menyeluruh**,” – Jumoke Oduwole, Sekretaris Presidential Enabling Business Environment Council (PEBEC)
- PEBEC, yang dibentuk pada tahun 2016 telah **menyusun indikator dan program mandiri terkait kemudahan berusaha**, yang telah menghasilkan ~160 reformasi hambatan birokrasi

GHANA | #118 (EODB 2020)



- Ghana menyatakan akan **tetap meneruskan reformasi kebijakan** yang telah dilaksanakan terkait EODB, namun juga belum memutuskan langkah berikutnya terkait acuan perbaikan
- “... kami akan terus melanjutkan reformasi (yang telah kami rencanakan) ... karena reformasi tersebut dibutuhkan untuk membuat ekonomi Ghana meningkat,” – Felix E. Addo, Konsultan untuk Kementerian Perdagangan

PAKISTAN | #108 (EODB 2020)



- Pakistan telah merespon penghentian laporan EODB, **namun belum menyampaikan tindak lanjut terkait Rencana Aksi Reformasi pasca-penghentian EODB**
- Pakistan belum lama ini **menetapkan Rencana Aksi Reformasi melalui kolaborasi dengan Bank Dunia** dengan berlandaskan Sistem Pemeringkatan EODB

FILIPINA | #95 (EODB 2020)



- Pasca-penghentian laporan EODB, **Filipina merencanakan untuk melokalisasikan Sistem Pemeringkatan Kemudahan Berusaha** tersebut untuk tetap menumbuhkan sisi kompetitif untuk pemerintah daerah tingkat provinsi dan kota
- Sebelumnya, Filipina telah **memberlakukan payung hukum terkait EODB & pelayanan pemerintahan yang efisien** pada tahun 2018 yang menjadi basis sebuah divisi khusus di Kantor Presiden Filipina

INDIA | #63 (EODB 2020)



- India telah menyatakan bahwa penghentian laporan EODB **tidak menghentikan komitmen mereka untuk meningkatkan Kemudahan Berusaha di India**
- Di sisi lain, sejak 2015, India sudah dengan ketat mengikuti praktik terbaik dalam EODB dalam menyusun rencana aksi reformasi bisnis (**Business Reforms Action Plan/ BRAP**) secara tahunan yang diterapkan kepada pemerintah daerah (*state*)



Kementerian Investasi/ BKPM tetap akan fokus dalam perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia

PILAR PERBAIKAN KEMUDAHAN BERUSAHA



PENYEDERHANAAN PROSEDUR

Reformasi dan optimalisasi melalui deregulasi serta pelayanan **ONLINE** dan **PAPERLESS**



PERCEPATAN WAKTU

Pemangkasan waktu yang dibutuhkan untuk perizinan dan proses lainnya melalui penerapan **Kesepakatan Standar Layanan (SLA)** dan pemberian perizinan berbasis **RISIKO**



INTEGRASI DAN PENINGKATAN EFISIENSI

Integrasi dan optimalisasi sistem pelayanan perizinan antarinstansi yang **SEAMLESS** dan **EFISIEN**

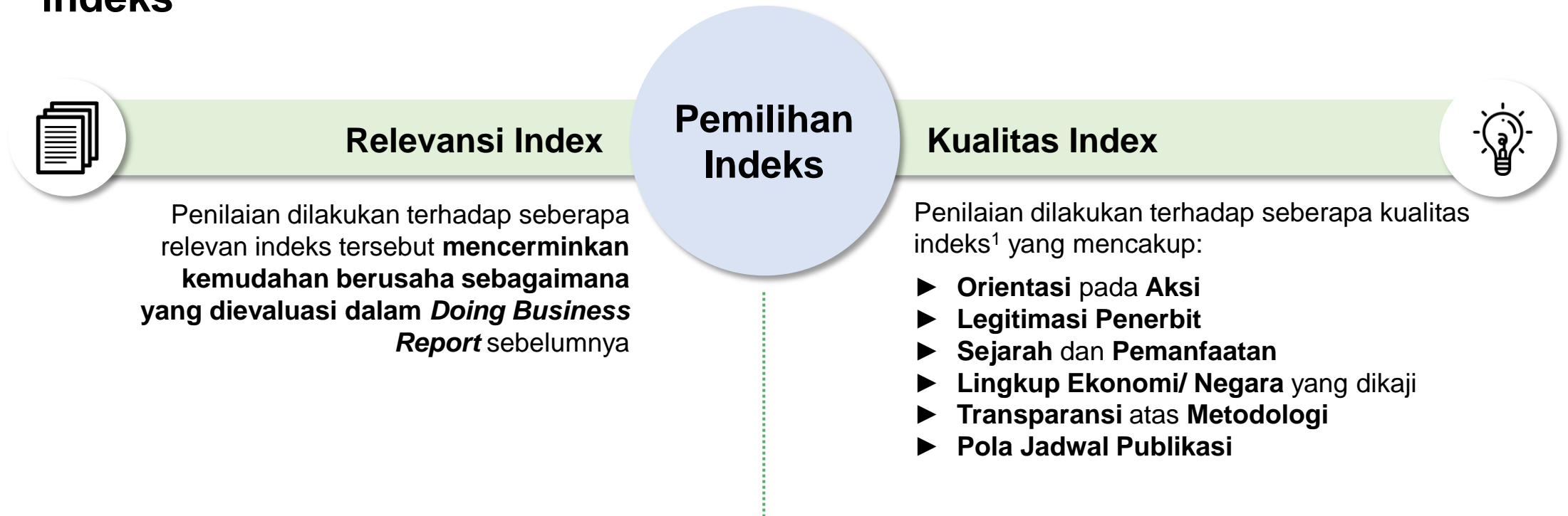


PENGUATAN TRANSPARANSI

Proses permohonan perizinan usaha dan kebijakan yang **TRANSPARAN** untuk semua pelaku usaha

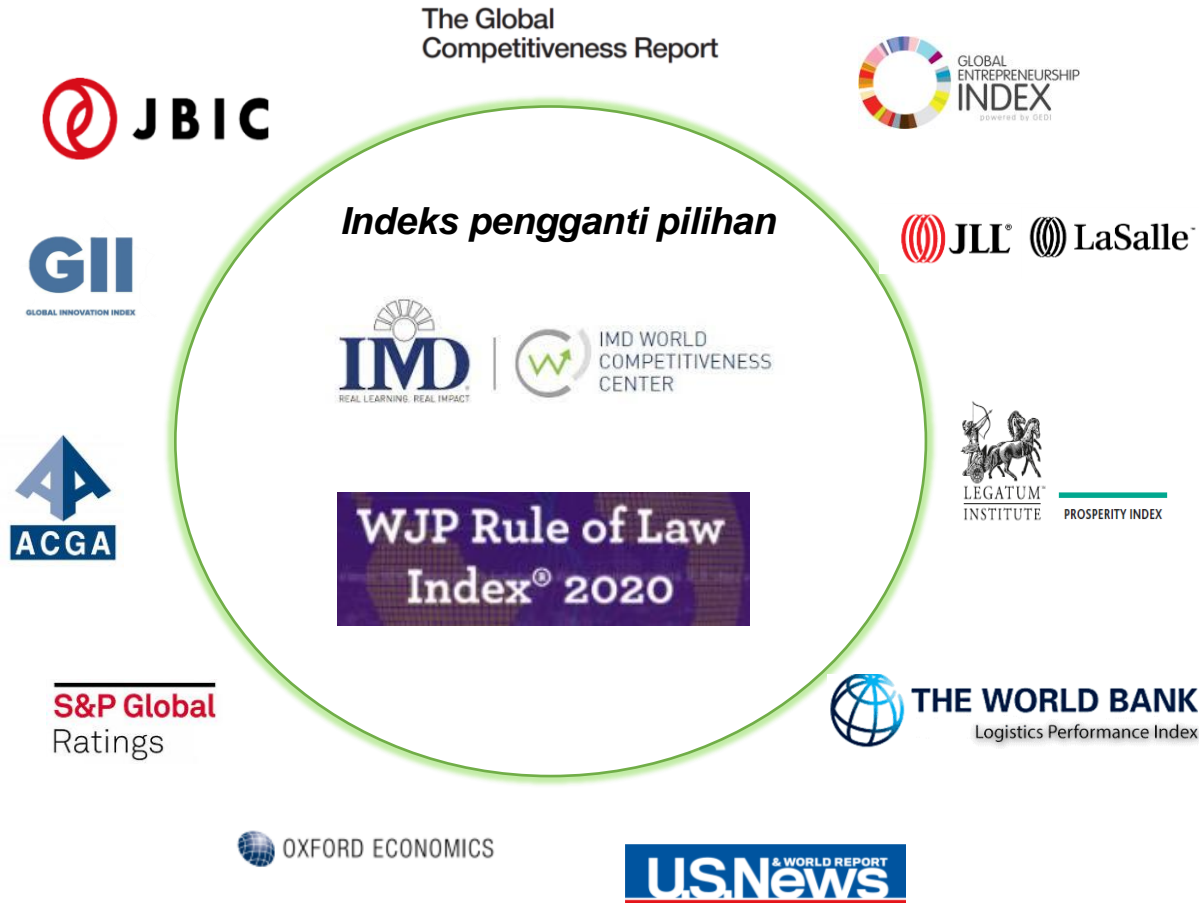
3

Terdapat beberapa indeks internasional yang dapat diadopsi menjadi opsi pengganti EODB dengan mempertimbangkan beberapa kriteria pemilihan indeks



¹Sumber: An Introduction to Indicators, UNAIDS (2010); Criteria for Selection of High-Performing Indicator, The EC Evaluation Center (2017); Good Practice Guidelines for Indicator Development and Reporting, Statistics NZ (2009); Deloitte analysis

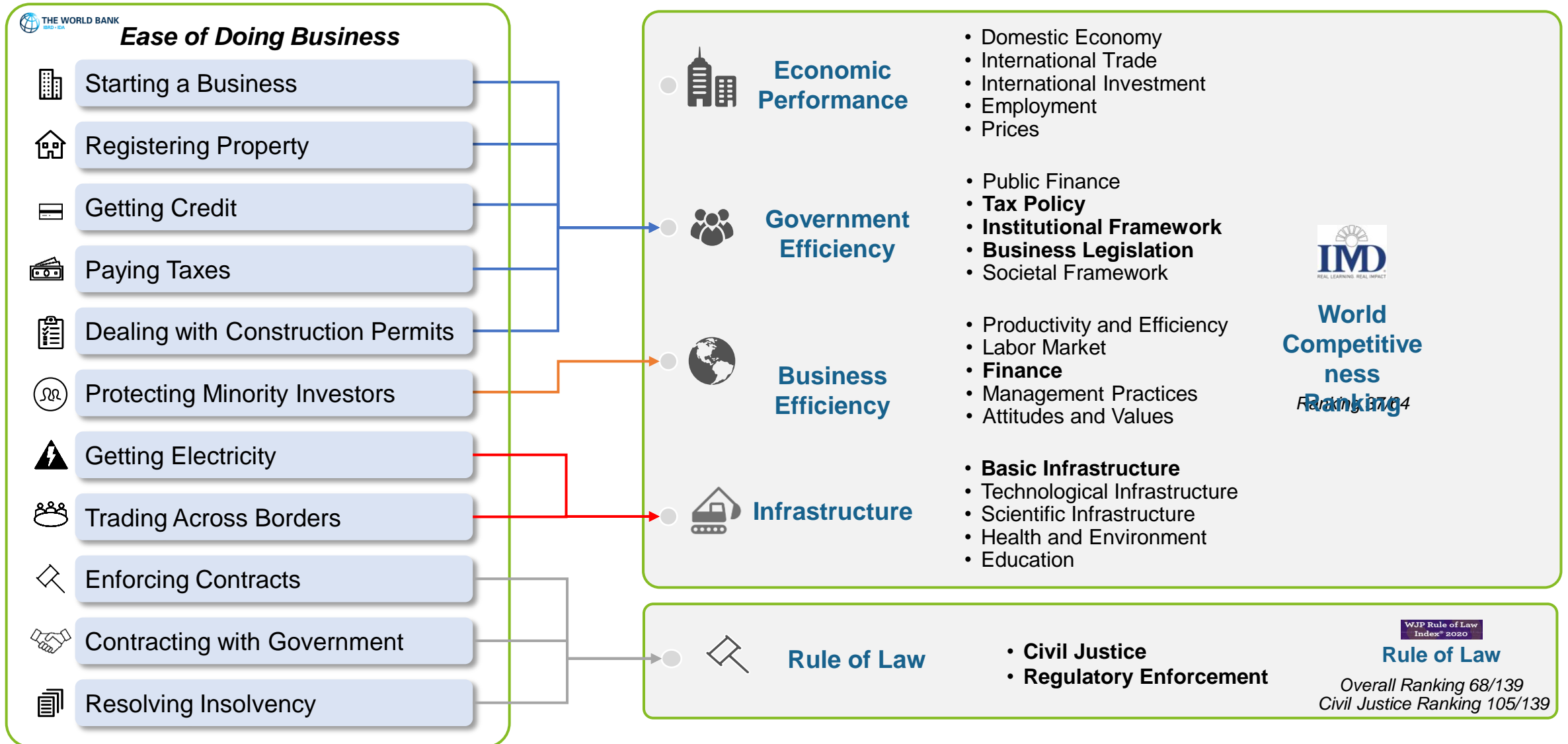
IMD World Competitiveness Index (IMD) yang dipadukan dengan Rule of Law Index (RoLI) memiliki relevansi terbaik di antara indeks kompetitif yang terkait



6 Alasan penggunaan IMD dan RoLI berdasarkan kualitas index

- 1 Orientasi pada Aksi**
Nilai-nilai dapat ditingkatkan secara langsung dengan reformasi tertentu
- 2 Legitimasi Penerbit**
Legitimasi penerbit sebagai institusi penelitian dan riset terpercaya
- 3 Sejarah dan Pemanfaatan**
Indeks telah dirilis lebih dari 10 tahun
- 4 Lingkup Ekonomi/Negara yang Dikaji**
Kajian/pemeringkatan dilakukan pada lebih dari 50 negara
- 5 Transparansi atas Metodologi**
Metodologi pengumpulan data/ tools/ instrumen & hasil dipublikasikan
- 6 Pola Jadwal Publikasi**
Publikasi indeks dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali

Seluruh topik yang dinilai dalam EODB dapat terpetakan ke aspek penilaian dalam indeks World Competitiveness Ranking IMD dan Rule of Law



IMD World Competitiveness Rankings dapat digunakan Indonesia dalam memahami tingkat daya saing dan sebagai acuan dalam reformasi pada aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya



IMD World Competitiveness Rankings



Indikator Penilaian

Indikator Utama	# sub-indikator
Performa Ekonomi	5
Efisiensi Pemerintahan	5
Efisiensi Usaha	5
Infrastruktur	5

- IMD bertujuan untuk memberikan sistem penilaian daya saing yang lebih lengkap dibandingkan GDP, dengan mengatribusikan faktor sosial, politik dan budaya
- *IMD World Competitiveness Rankings* menganalisis dan memberi peringkat negara sesuai dengan cara suatu negara mengelola kompetensi untuk mencapai penciptaan nilai jangka panjang

Jumlah Negara Partisipan 2021

6
4

Peringkat Indonesia

3
7

Sejarah & Pemanfaatan

- Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1989
- Penilaian ini dibuat untuk memberi peringkat daya saing ekonomi
- Kriteria penilaian diperbaharui apabila terdapat pembaruan pada teori, data, dan riset

Metodologi

- IMD menyebarkan survey (*Executive Opinion Survey*) kepada *Partner Institutes* (tersebar di 58 negara)
- Kombinasi antara data primer dan sekunder
- Responden adalah warga negara atau ekspatriat, di perusahaan domestik atau internasional yang tinggal setidaknya satu tahun di negara terkait

Jadwal Publikasi

- Setiap tahunnya, pada bulan Juni IMD merilis peringkat daya saing yang dikompilasi dalam *World Competitiveness Yearbook (WCY)*

WJP Rule of Law Index dapat menjadi opsi indikator alternatif dari EODB, terutama berkaitan dengan Enforcing Contracts



World Justice Project Rule of Law Index



Faktor Indikator Penilaian

8 Faktor	
Constraints on Government Powers	Order and Security
Absence of Corruption	Regulatory Enforcement
Open Government	Civil Justice
Fundamental Rights	Criminal Justice

- Mengukur supremasi hukum berdasarkan pengalaman dan persepsi umum praktisi hukum ahli di seluruh dunia
- Bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mengarahkan pengembangan program, dan menginformasikan hasil penelitian untuk memperkuat supremasi hukum negara-negara dan yurisdiksi terkait

Faktor Penilaian 8

Sub-Faktor 4

Jumlah Negara & Yuridiksi 128

Sejarah & Pemanfaatan

- Dipublikasikan sejak tahun 2012 oleh World Justice Project, dimanfaatkan sebagai rujukan instrumen kuantitatif mengenai supremasi hukum dari negara dan yurisdiksi di dunia.

Metodologi

- Menggunakan data primer kuantitatif yang diperoleh melalui:
- General Population Poll (GPP)
- Qualified Respondents' Questionnaires (QRQ)

Jadwal Publikasi

- Dipublikasikan secara tahunan

4

Serangkaian reformasi telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk reformasi struktural melalui Omnibuslaw UU Cipta Kerja dan kemudahan lainnya

UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020)

Di bawah UU Cipta Kerja, **79 UU di Indonesia** telah direvisi melalui satu undang-undang

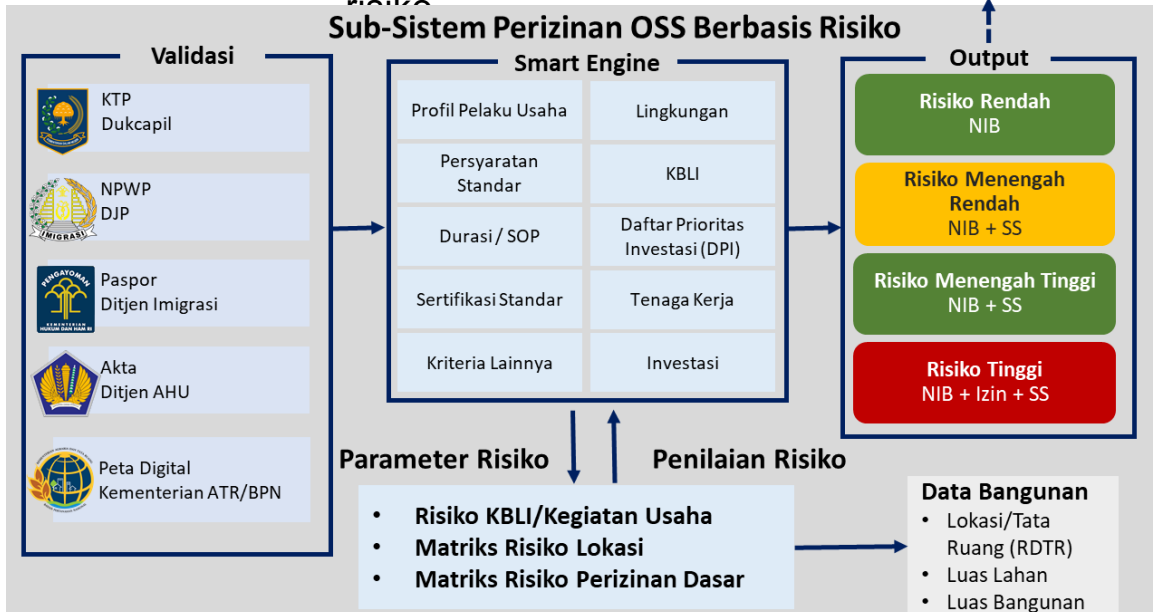


186 Pasal dan 15 Bab



Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Fasilitas Penanaman Modal



Reformasi struktural lainnya meliputi ...



Kemudahan Bagi UMK

- Perseroan Perseorangan
- Perizinan Tunggal untuk UMK



Kemudahan Perizinan Bangunan

- IMB digantikan dengan PBG
- Penggunaan SIMBG dan terintegrasi dengan OSS



Sertifikat Elektronik dan digitalisasi layanan pertanahan



Peradilan Gugatan Sederhana dan E-court sebagai terobosan kemudahan dalam penyelesaian sengketa bisnis



Kemudahan terkait Perpajakan

- Pelaporan perpajakan secara online
- Penurunan Tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%

Reformasi regulasi ditargetkan mempermudah perizinan UMKM yang berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia

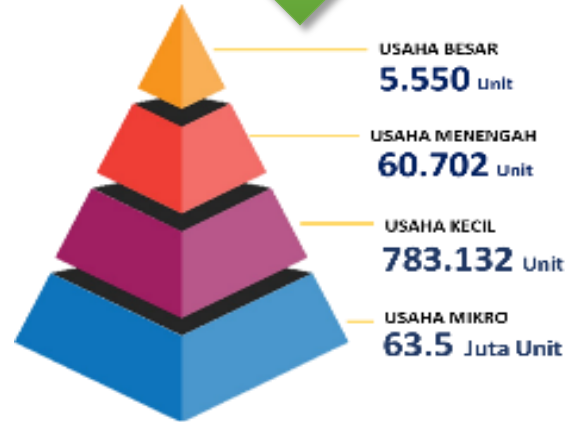


Pengaruh UKM terhadap PEREKONOMIAN INDONESIA



120 Juta

dari 133 juta angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM, baik **formal** maupun **informal**

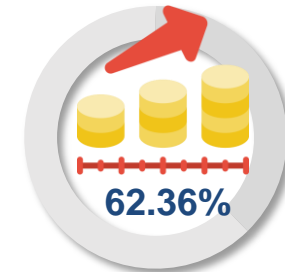


dari total unit usaha di Indonesia hampir **99,9 %** usaha di Indonesia adalah **UMKM**



UMKM dengan mayoritas berada di **usaha mikro** menyumbang PDB Indonesia

Target Kontribusi UKM pada perekonomian



Terhadap PDB (2021)

Sumber: KemenkopUKM, 2020

Target Kontribusi UKM terhadap ekspor



Dari Total ekspor (2021)

Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi UMKM

(PP Nomor 7 Tahun 2021)

Kriteria Usaha	Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Mikro	< Rp 50 Juta	< Rp 1 Miliar
Kecil	Rp 50 – 500 Juta	Rp 1 – 5 Miliar
Menengah	Rp 500 Juta – 10 Miliar	Rp 5 – 10 Miliar
Besar	> Rp 10 Miliar	> Rp 10 Miliar

memperluas **basis pembinaan** dan **pemberdayaan** UMKM

Fokus Keminves/BKPM dalam Peningkatan Daya Saing UMKM



Perizinan Berusaha dan kemudahan bagi UMKM

Kemitraan UMKM:

- **Kewajiban kemitraan bagi Usaha Besar** (Perpres 10/2021)
- Kemitraan dengan Usaha Besar yang **memperoleh insentif**



Kemudahan Legalitas

- Pendirian **PT Perseorangan** bagi UMK
- NIB sebagai **Perizinan Tunggal bagi UMK** (Risiko Rendah: NIB sebagai identitas, legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal)
- **Pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal** oleh Pemerintah
- **Pembebasan biaya perizinan** bagi UMK

Kemudahan Produksi dan Pembiayaan

- Kemudahan **pembiayaan dan permodalan**;
- Kemudahan **penyediaan bahan baku dan proses produksi**;
- Peningkatan **kualitas SDM UMK**

Kemudahan Pemasaran dan Pasca Produksi

- Alokasi **30% dari lahan komersial**, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK
- Alokasi **minimal 40% pengadaan barang/jasa** pemerintah untuk produk UMK.

Implementasi Fasilitasi Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



Bidang Usaha yang Dialokasikan untuk Kemitraan dengan UMKM-K sebagaimana tercantum dalam Perpres 10/2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49/2021 tentang “Bidang Usaha Penanaman Modal” :

182 Bidang Usaha/KBLI dalam 106 Kelompok Bidang Usaha dengan kriteria:

- Menggunakan teknologi sederhana;
- Bidang usaha memiliki kekhususan proses, padat karya, serta merupakan warisan budaya/turun temurun;
- Modal usaha < Rp10 Miliar.



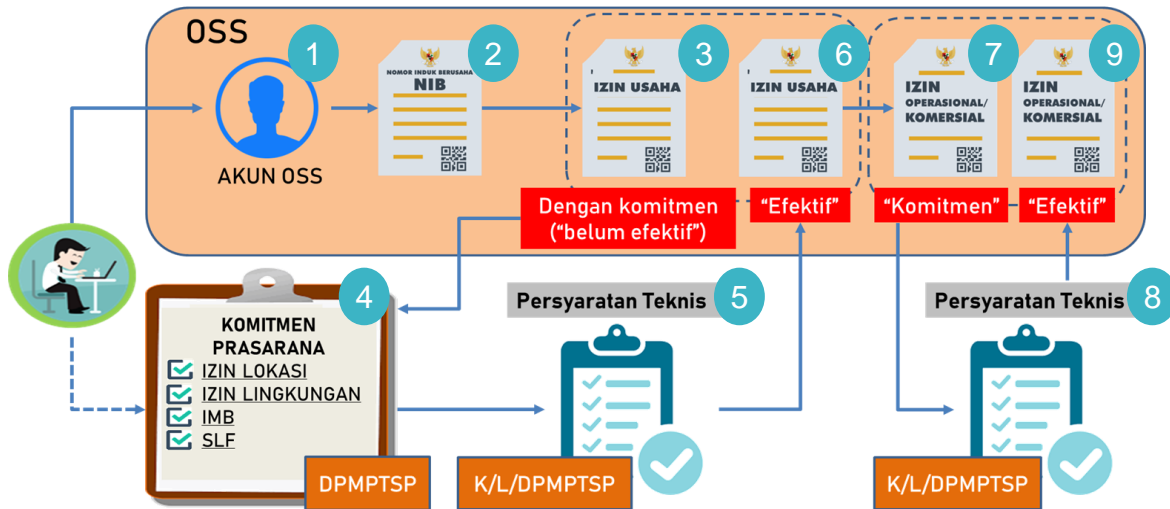
Kemitraan antara Perusahaan PMA/PMDN yang mendapatkan fasilitas fiskal dengan UMKM

Kementerian Investasi/BKPM mendorong kemitraan antara PMA/PMDN yang mendapatkan fasilitas dengan UMKM :

- Tax Holiday;
- Tax Allowance; dan/atau
- Fasilitas Pembebasan Bea Masuk bagi Impor Mesin serta Bahan Baku (Masterlist)

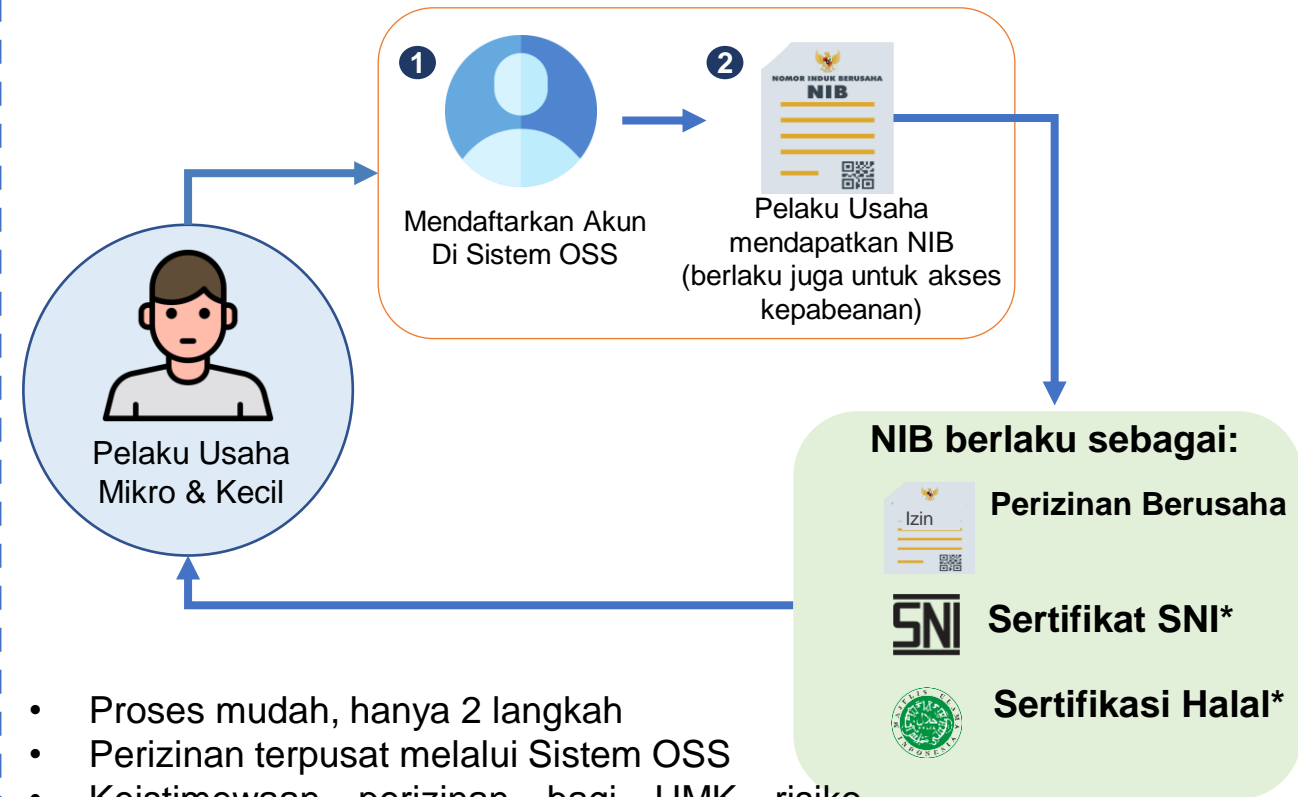
Percepatan Legalitas UKM Melalui Sistem OSS

Sebelum



- Proses memakan waktu lama dan berbelit-belit
- Perizinan tersebar di berbagai instansi
- Perlakuan perizinan antara UMK dan usaha besar disamakan
- Tidak terdapat pembinaan dari pemerintah bagi UMK

Setelah



- Proses mudah, hanya 2 langkah
- Perizinan terpusat melalui Sistem OSS
- Keistimewaan perizinan bagi UMK risiko rendah, cukup NIB
- Terdapat pembinaan dari pemerintah bagi UMK terutama untuk SNI dan Halal

* Dilakukan pembinaan oleh pemerintah



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

TERIMA KASIH



Kementerian Investasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 - Indonesia
T: +62 21 525 2008 | F: +62 21 525 4945 | E: info@bkpm.go.id
bkpm.go.id | investindonesia.go.id